

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1997 seakan menjadi peringatan bagi Bangsa Indonesia untuk membangun perekonomian yang lebih baik lagi. Pada tahun 1998, pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun akhirnya tumbang oleh kehendak rakyat yang sudah lama menginginkan adanya perubahan. Dari keinginan tersebut, terciptalah era reformasi yang menjadi acuan perubahan diseluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di Indonesia termasuk di lingkungan pemerintahan.

Perubahan penting yang terjadi setelah reformasi pemerintahan di tahun 1998 adalah adanya reformasi di bidang keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah. Indonesia telah menggunakan perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan landasan hukum yang telah digunakan sebagai acuan pengelolaan keuangan daerah, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jika diamati, perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang terkandung pada undang-undang tersebut diatas adalah dalam

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungannya dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi (Nurlan Darise : 2008 ; 1).

Perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (*good government governance*). Hal terkait yang menjadi sorotan publik akan perubahan tersebut adalah dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan (Deddi Nordiawan, et.al : 2012 ; 1).

Upaya pemerintah selanjutnya dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dilakukan dengan menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri) Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (berbasis akrua), sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP (berbasis kas menuju akrua). Adapun penerapan SAP Akrua tersebut, sebagaimana dinyatakan di dalam Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 yang memuat Pernyataan SAP berbasis akrua, wajib diterapkan selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) tahun sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun anggaran 2015, semua entitas pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis akrual. Akan tetapi, ada kemungkinan sebagian besar pemerintah daerah masih belum siap untuk mengimplementasikan PP Nomor 71 tahun 2010 atau akuntansi berbasis akrual penuh. Fenomena ini berdasarkan indeks hasil pemeriksaan sementara (IHPS) semester I tahun 2012 oleh BPK, masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini tidak wajar (*adverse*) dan tidak memberikan pendapat (TMP) (Hetti Herlina : 2013).

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) juga menemukan masalah yang sama terkait dengan implementasi penuh sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Metrovnews.com, Jakarta). Masalah tersebut adalah persiapan pemerintah pusat yang belum sepenuhnya efektif mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada tahun 2015. Akibatnya muncul ketidakjelasan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada satuan kerja pengelola Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, ketidakseragaman penyajian laporan keuangan, dan ketidakhandalan data untuk menyusun laporan keuangan.

Di dalam Pasal 6 PP No. 71 tahun 2010 dinyatakan bahwa untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual, pemerintah pusat maupun daerah harus membangun sistem akuntansi yang mengacu kepada SAP berbasis akrual tersebut. Bagi pihak-pihak tertentu, 4 tahun bukanlah waktu yang lama untuk melakukan persiapan menyongsong sistem akuntansi yang baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari sanalah bermunculan argumen lain yang didasari oleh pertimbangan biaya dan manfaat dari penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Jika dilihat dari segi pertimbangan biaya, penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual memerlukan pergantian sistem informasi dan teknologi yang baru (pergantian software) serta bimbingan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia yang akan berinteraksi langsung dengan sistem yang baru. Pergantian tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit bagi pemerintah daerah. Selain itu, tuntutan akan penyajian laporan keuangan yang harus lebih baik lagi dari basis sebelumnya mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan manfaat yang diterima daripada biaya yang akan dikeluarkan. Pemerintah daerah ada yang baru mulai berbenah, mulai memahami penyusunan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) tetapi kini harus beralih dengan basis akrual.

Mengingat kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual ini, maka penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah memerlukan sistem informasi akuntansi dan sistem berbasis teknologi informasi yang lebih rumit. Perubahan sistem akuntansi pemerintah daerah akan berdampak pada perubahan sistem informasinya. Perubahan sistem informasi akuntansi berbasis akrual yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pihak-pihak yang bersentuhan secara langsung dan pelaksana di lapangan tidak dapat menjalankan sesuai harapan. Karena secara umum, perubahan sistem akuntansi di pemerintah daerah kurang mendapat dukungan penuh dari para pimpinan. Hal

iniilah yang dapat memunculkan kendala-kendala dalam proses implementasinya (Saring Suhendro, et.al : 2015).

Dalam rangka implementasi akuntansi basis akrual, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menetapkan perangkat regulasi dan kebijakan terkait implementasi SAP berbasis akrual, yaitu Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2014 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Walikota Nomor 155 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru; Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota; dan Peraturan Walikota Nomor 123 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota. Akan tetapi, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Pekanbaru TA 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015 mengungkapkan sebanyak 13 (tiga belas) temuan pemeriksaan. Salah satu temuan tersebut adalah bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru belum menerapkan laporan keuangan berbasis akrual secara memadai. Hasil pemeriksaan BPK atas kesiapan penerapan laporan keuangan berbasis akrual menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebijakan akuntansi Pemko Pekanbaru belum mengatur amortisasi aset tak berwujud dan mekanisme perhitungan penyusutan aset tetap renovasi.
- b. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan penatausahaan keuangan daerah belum didistribusikan secara merata.
- c. Penempatan SDM belum mendukung penerapan SAP berbasis akrual.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) belum terintegrasi dengan aplikasi pendukung lainnya, seperti aplikasi pengelolaan aset tetap, aplikasi gaji, aplikasi persediaan, seta aplikasi pendapatan (Sumber : LHP BPK RI TA 2015 untuk Pemko Pekanbaru).

Bapak Julian, S.E, Ak selaku staf fungsional umum di bidang akuntansi pada BPKAD Pemko Pekanbaru yang ditemui pada hari Selasa, 7 Maret 2017 pukul 15.00 WIB di ruangan kerjanya, mengatakan bahwa :

“Masih banyak hambatan dan kendala yang dihadapi, ya maklum lah masih tahun pertama... hambatannya itu kalau dari sisi kebijakan, kita harus menunggu peraturan dari pusat yang biasanya turun di akhir atau di tengah tahun... Nah, kendalanya itu kita jadi memiliki waktu yang sedikit untuk melakukan konsultasi atau pendalaman yang lebih ketika akan memulai tahun anggaran yang baru. Dari sisi SDM juga masih banyak kendala, karena pejabat penatausahaan keuangan sendiri belum semuanya yang lulusan akuntansi. Dan dari sisi pengendalian internal itu masih banyak kekurangan yang bersifat administratif terkait dengan dokumen-dokumen yang dulunya belum ada, sekarang harus dibuat”.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pemko Pekanbaru belum maksimal dalam upaya meningkatkan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Kondisi tersebut terjadi karena Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peraturan atau ketentuan dalam penerapan SAP berbasis akrual sesuai dengan amanat undang-undang.

Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu kendala yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi sistem informasi akuntansi berbasis akrual yaitu berupa resistensi pengguna (*user resistance*) yang merupakan perwujudan dari

sikap Sumber Daya Manusia (SDM). Individu selaku pengguna sistem merupakan pihak yang paling bereaksi akan adanya perubahan. Bisa jadi ada pihak internal (individu-individu) yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan.

Bentuk dari resistensi masing-masing pengguna berbeda-beda tiap individunya. Ada yang menunjukkan reaksi secara aktif, yaitu berupa sikap penolakan yang ditunjukkan secara langsung. Dan ada pula yang menunjukkan reaksi pasif, yaitu individu tetap menjalankan peraturan yang telah ada dengan sistem yang baru, akan tetapi menghujat dalam diam dan tidak menjalankan sistem dengan sepenuh hati. Reaksi pasif seperti inilah yang sulit dilihat secara kasat mata. Bahkan ada pula individu yang bereaksi acuh tak acuh, tidak menganggap keberadaan sistem, atau bahkan bersikap netral.

Terkait mengenai sikap resistensi, Bapak Julian, S.E, Ak mengatakan :

“Kalau sikap resistensi itu lebih bersifat subjektif ya dari setiap orang, dari sisi kita sendiri di BPKAD sudah memberikan pelatihan, pendidikan, sosialisasi, terus kita juga ada pemantauan kepada SDM apakah mereka ada kendala untuk menyusun laporan akhir tahun atau tidak. Kalau dari sikap resistensinya ya pasti ada, tapi lebih bersifat pasif, misalnya mereka sih tetap mendukung adanya sistem akrual ini, tapi dibelakang mereka ada mengeluh-mengeluh gitu lah... kurang mengetahui akrual pun jadi penyebabnya. Maklum lah, kan masih tahun pertama, mungkin baru bisa lancar 4 sampai 5 tahun ke depan. Tapi yang namanya akrual basis ini peraturan, ya mau tidak mau... suka tidak suka harus tetap dijalankan”.

Banyak faktor yang menyebabkan munculnya resistensi pengguna. Faktor-faktor tersebut dapat disebabkan karena telah terbiasa menggunakan sistem yang lama, kurangnya pemahaman terhadap sistem akuntansi yang baru, tidak merasakan manfaat secara langsung, kurangnya perhatian pemimpin, dan lemahnya kualitas teknis. Bentuk dari resistensi pengguna berbeda tiap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu, oleh karena itu masih banyak faktor lain yang menyebabkan resistensi pengguna sistem terhadap implementasi sistem informasi akuntansi akrual.

Individu selaku pengguna sistem merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi sistem akuntansi yang baru. Perilaku individu yang telah ditunjukkan sebagai implikasi dari penerapan sistem akuntansi yang baru tersebut dapat menyebabkan ketidakefektifan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual atau bahkan kegagalan. Agar implementasi sistem akuntansi berbasis akrual dapat diterima dengan baik oleh pemakainya, maka perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan penolakan harus dikendalikan dan diubah agar pemakainya mau berperilaku menerima.

Implementasi penuh sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada tahun anggaran 2015 tidak hanya dilakukan di Indonesia, akan tetapi dilakukan juga oleh negara-negara berkembang lainnya. Salah satu negara berkembang yang juga menerapkannya adalah Malaysia. Penelitian Nurul Nadiyah Ahmad (2015) yang berjudul *Investigating the Factors Influencing Users' Resistance towards Accrual Accounting* mengungkapkan bahwa terjadi resistensi pengguna dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Ada 5 faktor yang mempengaruhi resistensi pengguna tersebut yaitu, top manajemen (*organisation*), teknologi dan sistem (*technologies and system*), opini kolega (*colleague opinion*), kemampuan individu (*self-efficacy*), dan masalah eksternal (*external issues*). Berdasarkan hasil penelitian, teknologi dan sistem serta opini rekan merupakan faktor yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Kim dan Kankanhailli (2009) dalam Saring Suhendro, Sylvia Veronika NPS, dan Pigo Nauli (2015) yang terdapat dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVIII melakukan penelitian yang sama. Penelitian tersebut meneliti tentang resistensi pengguna terhadap implementasi sistem informasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Perbedaannya terletak pada penambahan variabel, waktu penelitian, objek penelitian, dan uji hipotesis secara simultan. Dari segi variabel, ada penambahan variabel yang digunakan, yaitu kebiasaan (*habits*). Dari segi waktu penelitian, penelitian ini dilakukan setelah implementasi penuh sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, yaitu PP Nomor 71 tahun 2010. Penelitian ini akan dilakukan pada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sebagai objek penelitian. Penelitian Saring Suhendro, et.al (2015) hanya menggunakan uji hipotesis parsial, akan tetapi dalam penelitian ini selain uji hipotesis parsial, peneliti juga akan menampilkan hasil uji hipotesis simultan.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan sistem akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting. Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor

yang ada pada satuan kerja tersebut, terutama faktor sumber daya manusia (Muhamad Indra : 2013).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang diberi judul “ **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESISTENSI PENGGUNA DALAM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA (PEMKO) PEKANBARU** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah kebiasaan (*habits*) mempengaruhi resistensi pengguna dalam implementasi sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis akrual ?
2. Apakah nilai persepsian (*perceived value*) mempengaruhi resistensi pengguna dalam implementasi sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis akrual?
3. Apakah dukungan organisasi (*organisation*) mempengaruhi resistensi pengguna dalam implementasi sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis akrual ?
4. Apakah opini kolega (*colleague opinion*) mempengaruhi resistensi pengguna dalam implementasi sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis akrual?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.3 Tujuan Penelitian

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah kebiasaan (*habits*), nilai persepsian (*perceived value*), dukungan organisasi (*organisation*), dan opini kolega (*colleague opinion*) secara bersama-sama mempengaruhi resistensi pengguna dalam implementasi sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis akrual ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar faktor kebiasaan (*habits*) mempengaruhi resistensi pengguna dalam implementasi sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Untuk mengetahui seberapa besar faktor persepsian (*perceived value*) mempengaruhi resistensi pengguna dalam implementasi sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
3. Untuk mengetahui seberapa besar faktor dukungan organisasi (*organisation*) mempengaruhi resistensi pengguna dalam implementasi sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
4. Untuk mengetahui seberapa besar faktor opini kolega (*colleague opinion*) mempengaruhi resistensi pengguna dalam implementasi sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
5. Untuk mengetahui seberapa besar faktor kebiasaan (*habits*), nilai persepsian (*perceived value*), dukungan organisasi (*organisation*), dan opini kolega (*colleague opinion*) secara bersama-sama mempengaruhi resistensi pengguna dalam implementasi sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penelitian ini dibatasi oleh hal-hal berikut :

1. Resistensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah resistensi pengguna secara individual.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Dinas di Pemerintah Kota Pekanbaru yang terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru. Pemilihan objek penelitian didasarkan kepada kemudahan aksesibilitas dalam memperoleh data.
3. Pemilihan responden penelitian ini merupakan staf atau pegawai yang bekerja di Bagian Keuangan dari masing-masing Dinas tersebut. Peneliti menganggap bahwa merekalah yang terlibat secara langsung dalam implementasi sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah, memperdalam, serta memperluas pengetahuan tentang resistensi pengguna sebagai implikasi dari sikap yang dihasilkan oleh individu-individu terhadap implementasi sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
- b. Bagi pengguna sistem, sebagai masukan untuk menentukan sikap mana yang harus dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menetapkan peraturan yang terkait dengan sistem informasi akuntansi pemerintah yang lebih baik lagi.
- c. Bagi pimpinan organisasi, sebagai bahan rujukan untuk tidak hanya memperhatikan sistem yang baru saja, akan tetapi lebih memperhatikan individu selaku pengguna sistem dalam organisasinya terkait dengan perubahan sistem informasi akuntansi berbasis akrual.
- d. Bagi pemerintah, sebagai bahan koreksi akan keberhasilan sistem informasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan melihat respon ataupun sikap dari individu selaku pengguna sistemnya.
- e. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang dengan mengembangkan dan memperluas ruang lingkup penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal penelitian yang menyajikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi acuan penelitian ini, serta digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada. Kemudian berisi tentang kerangka pemikiran dan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang pemilihan sampel dan populasi, sumber-sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil dari analisis data, hasil dan pembahasan dari beberapa uji yang telah dilakukan, termasuk uji hipotesis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dirangkum suatu kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, kemudian mencoba untuk memberikan saran-saran yang dapat mengatasi permasalahan yang dialami.

